

ANALYSIS OF THE OPERATIONAL RISK DISCLOSURE OF SHARIA BANKS FOR THE 2015-2019 PERIOD

ANALISIS TINGKAT PENGUNGKAPAN RISIKO OPERASIONAL BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2015-2019

Reza Rahmania Putri , Dian Filianti 

Departemen Ekonomi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga
reza.rahmania.putri-2017@feb.unair.ac.id*, dianfilianti@feb.unair.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), efisiensi, profitabilitas, dan ukuran perusahaan secara simultan dan parsial terhadap pengungkapan risiko operasional pada perbankan syariah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Teknik analisis data akan menggunakan analisis statistik deskriptif, analisis regresi data panel, koefisien determinasi (R^2), serta uji F dan uji t . Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, efisiensi, jumlah anggota DPS dan frekuensi rapat DPS secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan risiko operasional. Secara parsial, ukuran perusahaan dan frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan efisiensi berpengaruh negatif dan signifikan. Profitabilitas dan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan risiko operasional. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengetahuan mengenai keputusan pengungkapan risiko operasional perbankan syariah dan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, pemerintah, investor syariah, dan stakeholders perbankan syariah dalam mengetahui indikator-indikator yang mempengaruhi pengungkapan risiko operasional perbankan syariah.

Kata Kunci: risiko operasional, Dewan Pengawas Syariah, efisiensi, profitabilitas, ukuran perusahaan.

ABSTRACT

This study aims to investigate the effect of the Sharia Supervisory Board, efficiency, profitability, and firm size simultaneously and partially on operational risk disclosure in Islamic banking in Indonesia. The method used is a quantitative method. The data analysis technique will use descriptive statistical analysis, panel data regression analysis, coefficient of determination (R^2), as well as F test and t test. The sampling technique used is purposive sampling technique. The results of this study indicate that company size, profitability, efficiency, number of members of the Sharia Supervisory Board and the frequency of meetings of the Sharia Supervisory Board simultaneously have a significant effect on operational risk disclosure. Partially, company size and frequency of Sharia Supervisory Board meetings have a positive and significant effect, while efficiency has a negative and significant effect. Profitability and the number of members of the Sharia Supervisory Board have no significant effect on the disclosure of operational risk. This research contributes to knowledge about decisions on disclosure of Islamic banking operational risk and can be a reference for academics, government, sharia investors, and sharia banking stakeholders in knowing the indicators that affect the disclosure of Islamic banking operational risks.

Keywords: Operational Risk, Sharia Supervisory Board, Efficiency, Profitability, Firm Size.

Informasi artikel

Diterima: 29-06-2021
Direview: 30-08-2021
Diterbitkan: 30-09-2021

^{*)}Korespondensi (Correspondence):
Reza Rahmania Putri

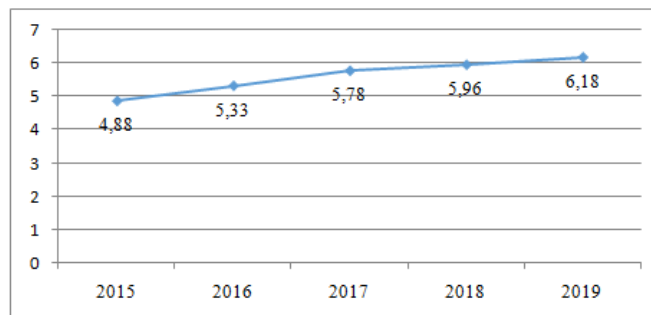
Open access under Creative
Commons Attribution-Non
Commercial-Share A like 4.0
International Licence
(CC-BY-NC-SA)



I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berkembang signifikan dalam keuangan syariah. Menurut ranking Global Islamic Economic Indicator Score tahun 2019, Indonesia berada di peringkat ke-5

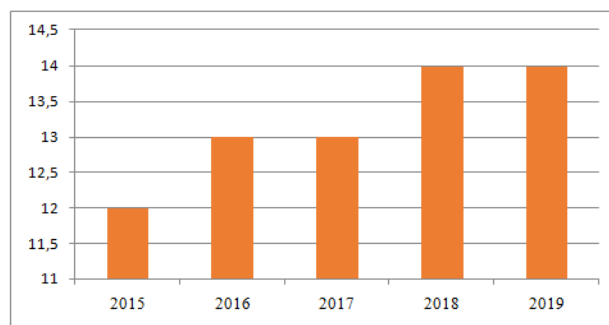
dalam peta ekonomi syariah global. Menurut data tahun 2019, total aset industri perbankan syariah mengalami kenaikan sebesar 538,32 triliun rupiah dan diperkirakan akan terus tumbuh di masa depan. Jumlah BUS atau Bank Umum Syariah di Indonesia juga meningkat sebanyak 14 bank yang semula pada tahun 2016 berjumlah 13 (OJK, 2019). Selain dilihat dari pertumbuhan total aset, perkembangan industri perbankan syariah dapat dilihat dari adanya pertumbuhan tren *market share* yang semakin naik sejak tahun 2015.



Sumber: OJK

Gambar 1.

Pertumbuhan tren *market share* perbankan syariah tahun 2015-2019 (dalam persen)



Sumber: OJK

Gambar 2.

Perkembangan jumlah BUS di Indonesia 2015-2019

Tabel 1.

Indikator Kinerja Perbankan Syariah

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Total Aset (triliun rupiah)	304,00	356,6	435,02	489,69	538,32
BOPO	94,38%	93,63%	89,62%	85,49%	82,52%
ROA	0,84%	0,94%	1,15%	1,59%	1,83%
CAR	15,02%	16,16%	17,91%	20,35%	20,59%
FDR	92,14%	88,87%	84,99%	86,11%	85,27%
NPF (Net)	2,77%	2,06%	2,13%	1,74%	1,89%

Sumber: Data diolah, OJK

Pertumbuhan ini diikuti oleh tumbuhnya jumlah perbankan syariah dari tahun 2015 yang hanya berjumlah 12 hingga sekarang berjumlah 14 bank. Pertumbuhan tren *market share* menjadi salah satu faktor yang menunjukkan kinerja dari bank syariah serta akan menunjukkan peningkatan kontribusi bank syariah terhadap perekonomian (Hadi & Fatihin, 2020). Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa keuangan perbankan syariah terus tumbuh kinerjanya dari tahun 2015.

Kinerja keuangan merupakan salah satu bentuk pengukuran kinerja perbankan syariah. Kinerja keuangan penting untuk stakeholders karena kinerja keuangan didefinisikan sebagai total nilai yang dapat diciptakan oleh perusahaan melalui aktivitasnya (Aminah et al., 2019). Beberapa faktor yang merepresentasikan semakin baiknya kinerja keuangan perbankan syariah adalah meningkatnya

profitabilitas (ROA), menurunnya pembiayaan bermasalah (NPF), meningkatnya penguatan permodalan (CAR), terjaganya likuiditas (FDR), dan membaiknya efisiensi pengelolaan biaya (BOPO).

Bank Syariah memiliki fungsi lembaga intermediasi dan fungsi sosial. Dalam pelaksanaannya, bank syariah dihadapkan pada risiko-risiko yang mungkin terjadi berkaitan dengan kegiatan usahanya. Risiko operasional merupakan risiko yang cenderung lebih sensitif bagi bank syariah dikarenakan adanya kompleksitas skema kontrak serta perbedaan lingkungan hukum dengan bank konvensional. Risiko operasional juga didefinisikan oleh Komite Basel Pengawasan Perbankan sebagai risiko kerugian dari proses internal tidak efektif. Sementara itu, IFSB merumuskan alternatif definisi risiko operasional dengan memasukkan risiko kepatuhan syariah dan risiko fidusia sebagai salah satu proksi dari risiko operasional pada bank syariah. Risiko operasional cenderung lebih sensitif bagi bank syariah karena adanya kompleksitas skema kontrak yang berbeda dengan konvensional (Izhar & Asutay, 2010). Lemahnya pengendalian internal bank yang menyebabkan risiko kepatuhan syariah menjadi bagian risiko operasional bank syariah dapat menimbulkan kerugian berdampak pada kredibilitas bank syariah (Ginena, 2014). Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, perbankan syariah diharapkan mampu mengatasi risiko operasional, dengan demikian hal ini tidak akan berdampak terhadap reputasi perbankan syariah karena asumsi bahwa harapan stakeholders operasional bank berjalan sesuai koridor syariah (Baidok & Septiarini, 2016).

Saat ini bank syariah mengalami perkembangan yang pesat sehingga juga akan berpengaruh terhadap peningkatan kompleksitas usaha dan profil risiko, karenanya perlu adanya manajemen terhadap risiko untuk dapat mengidentifikasi dan menindaklanjuti risiko yang sesuai dan cepat agar tidak memicu permasalahan mendasar yang dapat merugikan bank syariah. Manajemen atas risiko operasional bank di Indonesia yang diatur pada Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011. Komite Basel pengawasan perbankan dalam Basel Accord II juga mengharuskan bank untuk memiliki proses dan strategi manajemen risiko yang baik meliputi pengidentifikasian, pengukuran, dan pengalokasian risiko operasional (Elamer et al., 2020). Bank juga disyaratkan untuk menahan sejumlah modal tertentu dalam mengelola risiko operasional (Ibrahimovic & Franke, 2017).

Berdasarkan POJK No.65/POJK.03/2016 bank syariah wajib melaksanakan manajemen risiko yang efektif terhadap risiko kepatuhan, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko likuiditas, risiko strategis, risiko kredit, risiko reputasi, risiko investasi, dan risiko imbal hasil. Saat ini bank syariah mengalami perkembangan yang pesat sehingga akan berpengaruh terhadap peningkatan kompleksitas usaha dan profil risiko, karenanya perlu adanya manajemen terhadap risiko perusahaan untuk dapat mengidentifikasi dan menindaklanjuti risiko yang sesuai dan cepat agar tidak menimbulkan permasalahan mendasar sehingga dapat merugikan bank syariah.

Dalam praktik manajemen risiko, pengungkapan risiko merupakan hal yang penting untuk mengetahui tingkat kesehatan bank, serta menurunkan ketidakpastian perkiraan arus kas di masa depan untuk pertimbangan keputusan investor (Barakat & Hussainey, 2013). Perbankan syariah memiliki kewajiban untuk mengungkapkan informasi risiko di laporan tahunan sejak tahun 2011 mengacu pada peraturan BI No. 13/23/PBI/2011. Risiko operasional merupakan salah satu informasi risiko yang harus diungkapkan oleh bank syariah. Risiko kepatuhan syariah menjadi risiko operasional pada bank syariah sehingga bank syariah diharapkan untuk secara sukarela mengungkapkan lebih banyak informasi mengenai risiko operasional terutama yang berkaitan dengan aktivitas kepatuhan syariah (Elamer et al., 2020). Sehingga, permintaan atas pengungkapan risiko operasional merupakan informasi yang dibutuhkan oleh *stakeholders* karena diharapkan dapat menjaga kepercayaan para *stakeholders* terhadap kualitas operasional bank syariah serta meningkatkan legitimasi dan reputasi perusahaan untuk keberlanjutan operasional bank syariah dalam jangka panjang (Neifar & Jarbou, 2018).

Dewasa ini perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Seiring berkembangnya perbankan syariah ini akan berdampak juga pada berkembangnya kompleksitas usaha dan risiko bank. Pada perbankan syariah, risiko kepatuhan syariah merupakan bagian dari risiko operasional sehingga bank diharapkan secara sukarela untuk mengungkapkan lebih banyak informasi mengenai risiko operasional terutama yang berkaitan dengan aktivitas kepatuhan syariah. Sehingga informasi risiko operasional adalah bagian dari pengungkapan perbankan syariah

yang dibutuhkan oleh stakeholders. Beberapa penelitian terdahulu dari Elamer et al., (2020) serta Neifar & Jarbou (2018) mengidentifikasi struktur dan mekanisme CG yang mempengaruhi keputusan pengungkapan perusahaan pada perbankan syariah. Selain itu peneliti lain Nova & Oktaviana (2016) serta Kumalasari, Subowo, & Anisykurlillah (2014) meneliti kinerja keuangan mempengaruhi keputusan pengungkapan. Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, masih sedikit penelitian yang mengidentifikasi tentang pengaruh CG serta kinerja keuangan terhadap keputusan pengungkapan informasi risiko operasional pada perbankan syariah Indonesia. Hal tersebut menjadi landasan penelitian ini menarik topik mengenai bagaimana sistem tata kelola perusahaan dan kinerja keuangan mempengaruhi pengungkapan informasi risiko operasional perbankan syariah di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengetahuan mengenai keputusan pengungkapan risiko operasional perbankan syariah dan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, pemerintah, investor syariah, dan stakeholders perbankan syariah dalam mengetahui indikator-indikator yang mempengaruhi pengungkapan risiko operasional perbankan syariah.

Melihat fenomena perkembangan perbankan syariah di Indonesia serta masih banyaknya perbedaan dalam hasil penelitian sebelumnya, penelitian ini akan menguji hubungan variabel yakni DPS, jumlah anggota dan frekuensi rapat anggota, efisiensi, profitabilitas, serta ukuran perusahaan sebagai determinan pengungkapan risiko operasional terhadap pengungkapan risiko operasional. Indeks pengungkapan risiko operasional (ORD) yang digunakan mengacu pada Surat Edaran No. 10/SEOJK.03/2014 serta beberapa penelitian terdahulu yang mengacu pada standar IFSB dan Basel II, kemudian menguji hubungannya terhadap DPS, frekuensi rapat DPS, BOPO, ROA, dan total aset pada BUS di Indonesia yang terdaftar pada OJK periode tahun 2015-2019.

Penelitian ini akan melengkapi kesenjangan penelitian sebelumnya, (Elamer et al., 2020) menemukan bahwa proporsi direksi luar, kepemilikan institusi, komite audit, dan DPS berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan risiko operasional. Sedangkan (Yuanisa, 2019) menemukan bahwa DPS, Komite Audit Independen, Dewan Komisaris Independen, dan profitabilitas secara signifikan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko operasional. Sebaliknya, (Nugroho, 2012) menemukan bahwa profitabilitas secara signifikan berpengaruh terhadap pengungkapan risiko operasional. Elamer et al. (2020) dan Saggat (2017) menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka diajukan sebuah rumusan masalah atas penelitian:

1. Apakah jumlah Dewan Pengawas Syariah, frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah, BOPO, ROA, dan total aset berpengaruh secara simultan terhadap ORD?
2. Apakah jumlah Dewan Pengawas Syariah, frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah, BOPO, ROA, dan total aset berpengaruh secara parsial terhadap ORD?

II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Stakeholders

Stakeholders Theory atau disebut juga teori *stakeholders* menyatakan bahwasanya perusahaan bukanlah sebuah entitas yang memiliki tujuan hanya untuk memaksimalkan laba dan memenuhi kepentingan pemegang saham tetapi juga *customers, suppliers, creditors*, pegawai, manajer, dan masyarakat sebagai bagian dari operasional dari perusahaan. Penilaian dari *stakeholders* perusahaan berdampak pada eksistensi dan stabilitas operasional perusahaan. Karenanya, perusahaan harus mampu memberikan manfaat kepada seluruh *stakeholders*-nya (Elms & Berman, 1997) dalam (Harjoto & Laksmana, 2018).

Teori Keagenan

Agency Theory atau disebut juga teori keagenan menyatakan tentang hubungan pemilik perusahaan dan orang-orang yang mengelola perusahaan (manajemen). Manajemen adalah agen bagi pemilik perusahaan yang dipercaya untuk mengelola perusahaan dengan efektif agar mampu menghasilkan keuntungan dengan penggunaan biaya yang efisien. Pemilik perusahaan (principal) hanya berperan untuk memonitor dan mengontrol operasional perusahaan yang dijalankan oleh pihak manajemen serta mengarahkan manajemen agar bertindak sesuai dengan kepentingan mereka (Jensen

& Meckling, 1979). Dalam teori ini, pengungkapan adalah mekanisme dalam pengawasan. (Elamer et al., 2020).

Signalling Theory

Signalling Theory atau teori sinyal menjelaskan pentingnya pengungkapan sebagai sarana komunikasi untuk mengurangi adanya kesenjangan informasi antara dua pihak yakni manajemen dan stakeholders. Informasi dalam pengungkapan tersebut akan mempengaruhi pengambilan keputusan stakeholders. Perusahaan melakukan pengungkapan dengan menyajikan informasi yang jelas dan terbuka agar seluruh stakeholders dapat memahami informasi yang disampaikan. Sehingga, tujuan dari pengungkapan adalah agar menyampaikan informasi yang kredibel serta relevan yang kemudian dapat memungkinkan stakeholders dalam melakukan penilaian sosial-ekonomi (Connelly et al., 2011).

Teori Legitimasi

Legitimacy Theory atau teori legitimasi menyatakan bahwa pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan akan menimbulkan reaksi pada lingkungan. Hal ini berdasarkan gagasan bahwa perusahaan beroperasi di masyarakat melalui kontrak sosial untuk melakukan tindakan yang diinginkan secara sosial yang diharapkan dapat meningkatkan legitimasi perusahaan dari masyarakat dengan demikian perusahaan dapat terus bertahan dan berkelanjutan untuk beroperasi dalam jangka panjang (Guthrie & Parker, 1989). Peningkatan pengungkapan risiko operasional termasuk yang berkaitan dengan kepatuhan syariah, dianggap sebagai strategi perbankan syariah untuk dapat melegitimasi operasionalnya dan mendapat penerimaan dalam masyarakat luas (Elamer et al., 2020).

Risiko Operasional

Risiko operasional menjadi lebih kompleks seiring dengan perkembangan waktu dengan kompleksitas bisnis dan teknologi yang berkembang. Selain itu, mayoritas kegagalan jasa dan produk baru bank serta penurunan *income* karena struktur biaya operasional menjadi wujud bahwa risiko operasional terdapat dalam usaha bank. Risiko operasional pada perbankan syariah dianggap lebih rentan dikarenakan adanya fitur perjnjian yang. khusus serta lingkungan. hukum umum (Jelita & Shofawati, 2019). IFSB mengklasifikasikan risiko hukum dan risiko kepatuhan syariah juga termasuk dalam risiko operasional pada bank syariah sejalan dengan apa yang disebutkan oleh Greuning and Iqbal (2011) bahwa kegagalan untuk mematuhi persyaratan syariah dapat memicu timbulnya risiko operasional pada bank syariah.

Pengungkapan Risiko Operasional

Pengungkapan risiko adalah aspek penting dalam laporan tahunan bank. Hal ini dikarenakan pengungkapan risiko merupakan wujud transparansi efektif dalam menilai profil risiko bank serta kecukupan modal bank dan pembentukan tanggung jawab dalam pengelolaan perbankan. Hal ini agar tetap menjalankan prinsip kehati-hatian berdasar kepercayaan pengelolaan risiko. Komite pengawas perbankan Basel mengajukan bentuk pembaharuan dari standar *Basel Accord I* yang dinamakan *New Basel Capital Accord* atau *Basel Accord II* yang mengharuskan bank untuk mengukur, mengalokasikan dan mengungkapkan risiko operasional. prinsip dasar Basel II berlaku sama baiknya dan idealnya untuk institusi perbankan syariah, namun praktik pengukuran risiko dan manajemen risiko membutuhkan adaptasi khusus yang lebih spesifik dengan karakteristik operasional bank syariah (Abdullah et al., 2011).

IFSB selaku badan pengaturan standar internasional merumuskan ketentuan alternatif dari standar Basel untuk risiko operasional pada industri keuangan Islam. Dalam ketentuan yang diterbitkan oleh IFSB disebutkan bahwa institusi keuangan Islam disarankan melakukan pengungkapan atas informasi perusahaan, salah satunya adalah pengungkapan informasi risiko operasional.

Tabel 2.
Pengungkapan Risiko Operasional Menurut IFSB

Pengungkapan Kualitatif	1.	Kebijakan untuk memasukkan ukuran risiko operasional ke dalam kerangka kerja manajemen, misalnya, penganggaran, penetapan target, tinjauan kinerja, dan kepatuhan.
	2.	Kebijakan mengenai proses; (a) untuk membantu melacak peristiwa serta potensi eksposur kerugian; (b) untuk melaporkan kerugian, indikator, dan skenario tersebut secara teratur; (c) untuk meninjau kembali laporan

		bersama-sama berdasarkan risiko dan garis manajer; dan (d) untuk memastikan kepatuhan syariah.
	3.	Kebijakan mengenai proses mitigasi kerugian melalui perencanaan kontijensi, perencanaan kesinambungan bisnis, pelatihan staff, dan peningkatan pengendalian internal, serta proses bisnis dan infrastruktur.
Pengungkapan Kuantitatif	4.	Pengungkapan ATMR kuantitatif untuk risiko operasional
	5.	Indikator eksposur risiko operasional seperti; (a) pendapatan kotor; dan (b) jumlah pendapatan yang tidak sesuai dengan syariah.

Sumber: IFSB. (2007)

Pada perbankan syariah di Indonesia, saat ini standar pengungkapan risiko perbankan secara umum diukur menggunakan acuan indeks pengungkapan yang tertera pada lampiran Surat Edaran OJK No.10/SEOJK.03/2014. Selain itu beberapa peneliti terdahulu seperti Neifar & Jarboui (2018), Elamer et al., (2020), dan Ameer(2018) juga menyusun *Operational Risk Disclosure Index* mengacu pada standar Basel II dan IFSB. Karena belum adanya peraturan khusus untuk parameter pengukuran pengungkapan risiko operasional pada BUS di Indonesia serta belum adanya indeks khusus yang mayoritas digunakan sebagai pengukuran pengungkapan risiko operasional, maka akan digunakan perpaduan antara standar umum dari Otoritas Jasa Keuangan dan beberapa penelitian sebelumnya untuk membangun ORDI yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 3.
Operational Risk Disclosure Indeks

No	Item
1	Skala usaha dan struktur organisasi Bank
2	Kompleksitas proses bisnis dan keragaman produk/jasa
3	<i>Corporate action</i> dan pengembangan bisnis baru
4	Informasi tentang penggunaan sistem kerja <i>outsourcing</i> atau tenaga alih daya dari luar perusahaan
5	Informasi mengenai etika bisnis yang dijalankan perusahaan sebagai landasan aturan norma dan perilaku dalam menjalankan pengelolaan bisnis
6	Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia
7	Kegagalan karena adanya faktor manusia (<i>Human Error</i>)
8	Pernyataan mengenai pengembangan integritas karyawan
9	Kompleksitas Teknologi Informasi
10	Perubahan Sistem Teknologi Informasi
11	Kerentanan Sistem Teknologi Informasi terhadap ancaman dan serangan Teknologi Informasi
12	<i>Maturity</i> Sistem Teknologi Informasi
13	Kegagalan Sistem Teknologi Informasi
14	Keandalan Infrastruktur Pendukung
15	Informasi mengenai kecurangan internal yang terjadi dari kelemahan pada aspek bisnis, sumber daya manusia, atau teknologi informasi
16	Informasi mengenai kecurangan eksternal yang terjadi dari faktor diluar perusahaan seperti terorisme, pandemi, atau bencana alam
17	Frekuensi dan materialitas kejadian eksternal
18	Strategi pemasaran atau informasi kepuasan pelanggan atau boikot
19	Jumlah <i>regulatory capital</i> untuk risiko operasional
20	Pendekatan yang digunakan untuk penghitungan <i>regulatory capital</i> risiko operasional
21	Evaluasi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko
22	Penerapan fungsi struktur dan organisasi dalam praktik pengelolaan risiko operasional
23	Strategi dan proses manajemen risiko operasional
24	Cakupan dan sifat sistem pelaporan risiko operasional
25	Teknik mitigasi atau transfer risiko operasional
26	Penerapan fungsi audit internal atau sistem pengendalian internal
27	Kecukupan kaji ulang oleh pihak independen Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Audit Internal
28	Pernyataan tanggungjawab manajemen mengenai anti pencucian uang dan pembiayaan anti terorisme
29	Pernyataan mengenai peran penasihat eksternal dalam praktik manajemen risiko
30	Pengungkapan ATMR setara untuk risiko operasional
31	Informasi mengenai eksposur risiko operasional

32	Pernyataan tentang kepatuhan atas prinsip dan aturan syariah
33	Informasi mengenai produk yang mencerminkan kepatuhan atas syariah
34	Informasi mengenai pengungkapan jumlah pendapatan non halal yang diperoleh dari produk syariah
35	Informasi tentang kontroversi peraturan yang tidak sesuai dengan syariah
36	Jenis pelanggaran atau ketidakpatuhan atas penerapan prinsip syariah baik berdasarkan temuan DPS maupun otoritas
37	Jumlah keputusan perdata dan syariah yang tertunda terkait dengan validitas produk perbankan
38	Pernyataan tentang segala bentuk perubahan dalam legalitas konsumen untuk menandatangani kontrak
39	Pernyataan penggunaan pihak eksternal dalam kasus hukum yang diajukan oleh bank terhadap rekening yang menunggak
40	Informasi mengenai distribusi zakat
41	Informasi mengenai qard-hasan
42	Pengembangan masyarakat serta pembiayaan investasi yang mendukung UMKM
43	Kerusakan aktiva akibat bencana alam atau terorisme

Hipotesis

Secara teori, teori agensi mengasumsikan perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar sehingga akan cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi untuk mengurangi biaya tersebut. Kedua, teori stakeholders mengasumsikan bahwa perusahaan besar dapat memberikan dampak yang lebih besar kepada stakeholders, sehingga semakin besar ukuran sebuah perusahaan maka akan semakin banyak stakeholders yang terlibat dalam perusahaan. Ketiga, teori sinyal dan legitimasi mengasumsikan bahwa perusahaan besar akan dituntut lebih meningkatkan transparansi pengungkapannya, hal ini akan menimbulkan reaksi positif pada lingkungan stakeholders sehingga dapat meningkatkan legitimasi perusahaan dengan demikian perusahaan dapat terus bertahan dalam jangka panjang.

Perusahaan besar secara umum akan mengungkapkan informasi lebih daripada perusahaan kecil karena besarnya biaya keagenan yang timbul karenadari pengawasan yang dilakukan principal terhadap kinerja agen selaku pengelola perusahaan. Jumlah biaya yang harus dikeluarkan tersebut untuk menjaga kedua belah pihak agar bisa saling percaya dan tidak ada pihak yang melanggar hak dan kewajiban yang dimiliki dikarenakan adanya perbedaan kepentingan diantara mereka. Upaya perusahaan melakukan pengungkapan dimaksudkan untuk mengurangi biaya tersebut adalah dengan memenuhi kebutuhan informasi kepada seluruh stakeholders sehingga pengungkapan informasi ini adalah bentuk pertanggungjawaban pengelola perusahaan kepada pemangku kepentingan atas pengelolaan perusahaan (Pradnyani & Sisidyani, 2015). Sehingga hipotesis yang diajukan:

H₁: Total aset berpengaruh signifikan terhadap ORD

Secara teori, teori agensi mengasumsikan bahwa ROA merupakan salah satu proksi informasi kinerja keuangan perusahaan yang naik atau turun tetap harus ditunjukkan oleh manajemen kepada pemegang saham karena dengan melakukan pengungkapan tersebut dapat mengurangi besarnya biaya keagenan. Kedua, teori stakeholders mengasumsikan bahwa komitmen bank untuk dapat memberikan manfaat kepada stakeholders dengan salah satunya memaksimalkan laba karena laba bukan hanya untuk kepentingan perusahaan tetapi juga untuk seluruh stakeholders yang terlibat dengan perusahaan. Ketiga, teori sinyal dan legitimasi mengasumsikan bahwa pengungkapan informasi ROA akan memberikan sinyal kepada masyarakat sehingga dapat menghindari reaksi negatif masyarakat dan menjaga legitimasi bank

Perusahaan dengan profit yang tinggi akan memutuskan untuk melakukan pengungkapan informasi risiko perusahaannya lebih luas karena perusahaan berharap hal itu adalah sebagai salah satu upaya dalam meyakinkan stakeholders bahwa perusahaan sedang dalam kompetisi meyakinkan dan menonjolkan kapasitas perusahaan yang baik pada saat itu. Hal ini dikarenakan asumsi bahwa perusahaan hanya ingin menunjukkan informasi kinerja perusahaan yang baik kepada stakeholders. Dengan demikian, perusahaan akan lebih memperhatikan manajemen risiko operasionalnya sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja operasionalnya. Sehingga hipotesis yang diajukan:

H₂: ROA berpengaruh signifikan terhadap ORD.

Secara teori, teori agensi mengasumsikan bahwa BOPO merupakan salah satu proksi informasi kinerja keuangan perusahaan mengenai kemampuan pengelolaan biaya perusahaan yang harus ditunjukkan oleh manajemen kepada pemegang saham sehingga pengungkapan BOPO dapat mengurangi biaya keagenan. Kedua, teori stakeholders mengasumsikan bahwa perusahaan harus mampu mengelola biaya operasional agar dapat menoperasikan perusahaan dengan baik sehingga memberikan manfaat bagi seluruh stakeholders. Ketiga, teori sinyal dan legitimasi mengasumsikan bahwa pengungkapan informasi BOPO akan memberikan sinyal kepada masyarakat sehingga dapat menjaga legitimasi bank mengenai kemampuan bank dalam mengelola biaya.

Perusahaan dengan efisiensi yang baik diasumsikan berhasil menghasilkan pendapatan dengan mengelola biaya operasionalnya seefisien mungkin. Perusahaan dengan tingkat efisiensi baik akan menandakan kinerja operasionalnya baik sehingga perusahaan akan cenderung sedikit mengalami kerugian operasional. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat efisiensi rendah akan meningkatkan manajemen risiko dan pengungkapan risiko operasionalnya untuk memperbaiki reputasi perusahaan. Sehingga hipotesis yang diajukan:

H₃: BOPO berpengaruh signifikan terhadap ORD.

Secara teori, teori agensi mengasumsikan bahwa efektifitas DPS dapat memitigasi kemungkinan terjadinya konflik agensi antara manajemen dan pemegang saham dengan melakukan pengawasan atas kepatuhan syariah dan operasional bank. Kedua, teori stakeholders mengasumsikan bahwa komitmen bank untuk senantiasa beroperasi dalam koridor syariah merupakan tanggungjawab yang harus dipenuhi terhadap stakeholders. Ketiga, teori sinyal dan legitimasi mengasumsikan bahwa keberadaan DPS dapat memberikan sinyal positif kepada masyarakat sehingga membantu melegitimasi kegiatan operasional bank untuk dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Pada perbankan syariah, yang dimaksud dengan sistem tata kelola yang baik adalah ketika perusahaan berhasil konsisten dalam norma dasar dan prinsip Islam sesuai standar kepatuhan bank syariah dan menciptakan maslahat kepada seluruh stakeholders. Dalam hal ini DPS memiliki fungsi internal penting sebagai pengawas untuk memastikan kegiatan operasional perbankan syariah berjalan sesuai prinsip syariah. Semakin besar jumlah anggota DPS dengan independensi dan kompetensi pengetahuan, maka dapat meningkatkan efektifitas pengawasan syariah manajemen dan mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan stakeholders sehingga dapat mengurangi konflik keagenan. Dengan demikian, jumlah anggota DPS yang independen dan kompeten dalam kepatuhan syariah dapat meningkatkan legitimasi dari masyarakat terkait pelaksanaan operasional bank sesuai syariah sehingga dapat mendorong adanya permintaan untuk lebih meningkatkan transparansi dalam pengungkapan risiko operasional yang mungkin terjadi. Sehingga hipotesis yang diajukan:

H₄: Jumlah anggota DPS berpengaruh signifikan terhadap ORD.

Secara teori, teori agensi mengasumsikan bahwa pertemuan yang dilakukan DPS untuk meninjau kembali penerapan prinsip kepatuhan syariah bank dapat meningkatkan efektifitas pengawasan DPS sehingga memitigasi kemungkinan terjadinya konflik agensi antara manajemen dan pemegang. Kedua, teori stakeholders mengasumsikan bahwa komitmen bank untuk senantiasa beroperasi dalam koridor syariah merupakan tanggungjawab yang harus dipenuhi terhadap stakeholders dengan demikian melalui hasil pertemuan yang dilakukan DPS dapat menyediakan informasi kepatuhan syariah yang kemudian akan dimunculkan pada pengungkapan perusahaan. Ketiga, teori sinyal dan legitimasi mengasumsikan bahwa pertemuan rutin DPS dapat memberikan sinyal positif kepada masyarakat mengenai baiknya pengawasan syariah yang telah dilakukan sehingga membantu melegitimasi kegiatan operasional bank untuk dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya dalam perusahaan, DPS melakukan pertemuan secara rutin secara langsung maupun virtual untuk meninjau pelaksanaan operasional dan produk bank syariah apakah sudah memenuhi prinsip dan aturan syariah. Frekuensi rapat dewan pengawas syariah merupakan salah satu karakteristik DPS yang juga merupakan syarat untuk mewujudkan *good corporate governance* dalam perusahaan. Pelaksanaan rapat ini dapat meningkatkan pemantauan dengan demikian akan mengarah pada penyediaan atas informasi lebih lanjut mengenai risiko kepatuhan syariah yang termasuk dalam risiko operasional perusahaan. Sehingga, semakin banyak

DPS melakukan rapat dalam meninjau ulang kepatuhan syariah perusahaan maka akan mengurangi kemungkinan terjadinya risiko operasional. Sehingga hipotesis yang diajukan:

H₅: Frekuensi rapat DPS berpengaruh signifikan terhadap ORD.

Ukuran perusahaan berkaitan dengan besar perusahaan yang dinyatakan dengan total aset. Aset adalah sumber dalam pengelolaan operasional perusahaan. Tingkat probabilitas dijadikan tolak ukur sebagai kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Sedangkan tingkat efisiensi memberikan gambaran mengenai seberapa efisien perusahaan dalam mengelola biaya untuk memperoleh laba tersebut. Sehingga, ketiga hal ini berkaitan dengan baik atau buruk manajemen perusahaan dalam pengelolaan operasional untuk mengoptimalkan nilai perusahaan. Dalam usaha mengoptimalkan nilai perusahaan tersebut, terdapat fungsi dewan pengawas syariah untuk memastikan perusahaan dalam mengelola perusahaan senantiasa untuk berada di koridor kepatuhan syariah sehingga akan mengurangi kemungkinan terjadinya risiko operasional. Sehingga hipotesis yang diajukan:

H₆: Dewan Pengawas Syariah, Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah, ROA, BOPO, dan total aset secara simultan berpengaruh terhadap ORD.

III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis regresi data panel untuk menjawab rumusan masalah yang akan menjelaskan hubungan antara variabel. Penelitian kuantitatif dipilih karena data numerik hasil penelitian yang digunakan dianalisis menggunakan uji statistika. Variabel independen Dewan Pengawas Syariah diukur menggunakan indikator ukuran (X1) dan frekuensi rapat (X2), tingkat profitabilitas (X3) menggunakan indikator rasio ROA, efisiensi (X4) menggunakan indikator rasio BOPO, dan ukuran perusahaan (X5) menggunakan indikator rasio total aset. Sedangkan variabel dependen (Y) adalah Operational Risk Disclosure Index yang digunakan untuk mengukur tingkat pengungkapan risiko operasional pada BUS. Dengan demikian, model empiris dalam penelitian ini:

$$Y_{ORDi} = \alpha + \beta_{SIZE} + \beta_{UDPS} + \beta_{FRDPS} + \beta_{BOPO} + \beta_{ROA} + e$$

Data yang digunakan adalah data sekunder yang akan dihimpun dari laporan keuangan tahunan BUS. Data yang akan digunakan juga merupakan data yang berupa data panel, yaitu selama 5 tahun mulai tahun 2015 hingga 2019.

Subjek penelitian menggunakan BUS yang terdaftar dalam OJK sebelum terjadinya *merger* pada periode 2015-2019 yang dipilih. Melalui *purposive sampling*, sehingga terdapat 11 perusahaan BUS sebagai sampel. Objek penelitian yaitu tingkat pengungkapan risiko operasional BUS. Berdasarkan latar belakang serta kesenjangan penelitian ditentukan 5 variabel yang meliputi ukuran perusahaan, profitabilitas, efisiensi, jumlah anggota DPS dan frekuensi rapat DPS.

Tabel 4.

Daftar Sampel Bank Umum Syariah

1.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
2.	PT. Bank Muamalat Indonesia
3.	PT. BCA Syariah
4.	PT. Bank Victoria Syariah
5.	PT. Bank Syariah Bukopin
6.	PT. Bank BRISyariah
7.	PT. Bank Panin Dubai Syariah
8.	PT. Bank Jabar Banten Syariah
9.	PT. Bank Mega Syariah
10.	PT. Bank BNI Syariah
11.	PT. Bank Syariah Mandiri

Teknik analisis data akan menggunakan analisis regresi data panel untuk mengetahui pengaruh simultan dan parsial antar variabel (Ajija et al., 2011), statistik deskriptif untuk mendeskripsikan karakteristik data, koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur kemampuan model menjelaskan

variabel independen, serta uji F dan uji t untuk menjelaskan pengaruh variabel. Teknik analisis dibantu dengan menggunakan perangkat lunak komputer Microsoft Excel untuk penjabaran data dan *Eviews 10* untuk pengujian model data empiris.

Defisini Operasional Variabel

1. Ukuran perusahaan adalah skala besar atau kecilnya sebuah perusahaan atas kepemilikan sumber daya oleh perusahaan baik itu sumber daya manusia atau modal yang diukur menggunakan total aset (Adelopo, 2011).
2. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari penggunaan aset atau sumber daya yang dimiliki pada kegiatan operasional yang diukur menggunakan ROA (Helbok & Wagner, 2006).
3. Efisiensi adalah konsep matematik dalam mengetahui keahlian manajemen perbankan menggunakan sumber keuangan serta mengendalikan seluruh tarif yang dikeluarkan dalam mengoperasikan keuangan itu yang diukur menggunakan BOPO (Nova & Oktaviana, 2016).
4. Jumlah Anggota DPS adalah total anggota DPS di perusahaan yang diukur menggunakan skala nominal dari seluruh anggota DPS (Khoirudin, 2013).
5. Frekuensi Rapat DPS adalah keberadaan anggota pada pertemuan yang ada untuk meninjau operasional perusahaan sesuai prinsip Islam yang dihitung dari keseluruhan pertemuan dalam satu tahun (Baidok & Septiarini, 2016).
6. Pengungkapan risiko operasional menggunakan pengukuran indeks dengan pendekatan coding, jika mengungkapkan akan ditandai dengan nilai 1 dan tidak mengungkapkan akan ditandai dengan nilai 0. Sehingga rumus yang digunakan adalah jumlah item yang diungkapkan : total item pengungkapan x 100%.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menentukan pemilihan estimasi model regresi data panel, dilakukan beberapa uji untuk mendapatkan metode pendekatan estimasi yang sesuai yaitu dilakukan uji *Chow Test* dan uji *Hausman Test*.

Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk membandingkan model *common effect* dan *fixed effect*. Apabila probabilitas uji-F > 0.05 maka memilih *common effect*, sedangkan apabila probabilitas uji-F < 0.05 maka memilih *fixed effect*.

Tabel 5.
Uji Chow

<i>EffectTest</i>	Statistic	Prob	Keterangan
Cross-Section. F	10.580	0.000	H ₀ ditolak

Sumber: Hasil EViews

Dari tabel di atas nilai probabilitas (*Cross-Section F*) sebesar 0.000 lebih kecil dari α (0.05) sehingga FEM lebih tepat dibandingkan CEM.

Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk membandingkan model *fixed effect* dan *random effect*. Apabila probabilitasnya > 0.05 maka memilih *random effect*, sedangkan apabila probabilitasnya < 0.05 maka memilih *fixed effect*.

Tabel 6.
Uji Hausman

<i>EffectTest</i>	Statistic	Prob	Keterangan
Cross-SectionRandom	6.478	0.262	H ₀ diterima

Sumber: Hasil EViews

Dari hasil di atas, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.262 lebih besar dari α (0.05) sehingga REM lebih tepat dibandingkan FEM.

Pembuktian Hipotesis

Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa metode analisis tepat untuk penelitian ini adalah REM.

Tabel 7.
Uji Data Panel

	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Probabilitas
C	-0.039990	0.207229	-0.192977	0.8478
SIZE	0.042339	0.012393	3.416413	0.0013
ROA	-0.361805	0.403046	-0.897676	0.3737
BOPO	-0.187544	0.053313	-3.517752	0.0009
DPS	0.002361	0.017196	0.137299	0.8914
FRDPS	0.002973	0.001445	2.057257	0.0450
R-Squared	0.496558		Prob > F	0.000002
Adj R-squared	0.445186			
Observasi (n)	55			

Sumber: Hasil EViews

Uji R²

Diketahui bahwa nilai R² sebesar 0,4965. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen diatas menjelaskan variabel ORD 49.65% dan sisanya sebesar 50.35% dijelaskan oleh variabel lain.

Uji F

Diketahui tingkat probabilitas (F-Statistik) sebesar 0,000002 lebih kecil dari level signifikan (0,05) maka H₀ ditolak dan dapat disimpulkan bahwa variabel DPS, FRDPS, ROA, BOPO, SIZE berpengaruh signifikan terhadap ORD secara simultan.

Uji T

Total Aset

Tingkat probabilitas sebesar 0,0013 yang lebih kecil dari α (0,05). Hal ini berarti SIZE berpengaruh signifikan terhadap ORD secara parsial. Pengaruh ini dapat disebabkan karena semakin besar perusahaan maka semakin banyak stakeholders yang terlibat dalam perusahaan, sehingga cenderung akan ada pengungkapan lebih banyak informasi karena adanya permintaan dari stakeholders karena penilaian atas kinerja perusahaan dapat dilihat pada pengungkapan perusahaan. Selain itu, dengan melakukan lebih banyak pengungkapan maka akan menghindari adanya kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara stakeholders sehingga akan mengurangi biaya keagenan yang harus dikeluarkan perusahaan. Perusahaan yang lebih besar juga cenderung melakukan praktik pengungkapan dengan lebih baik karena semakin besar perusahaan maka secara rasional akan semakin tinggi juga kemungkinan risiko yang dapat terjadi sehingga penekanan dalam pengungkapan risiko akan lebih tinggi untuk memberikan sinyal kepada stakeholders bahwa perusahaan dapat mengelola seluruh risikonya dengan baik. Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian dari Hemrit (2020) serta Aryani and Hussainey (2017) yang menyatakan bahwa total aset berpengaruh signifikan terhadap ORD.

Profitabilitas

Tingkat probabilitas sebesar 0,3737 yang lebih besar dari α (0,05). Hal ini berarti secara parsial ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap ORD. Hal ini dikarenakan bahwa faktanya profitabilitas tidak mempengaruhi secara langsung keputusan pengungkapan bank, sehingga banyak atau sedikit profit yang dihasilkan bank, bank akan tetap melakukan pengungkapan karena sifat dari pengungkapan informasi risiko operasional adalah mandatory bagi bank. Hal ini didukung oleh pelaksanaan fungsi pengawasan kinerja bank bahwa manajemen akan tetap memberitahu stakeholders melalui pengungkapan mengenai informasi kinerja bank. Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian dari Elamer et al., (2020) dan Doi and Harto (2017) yang menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap ORD.

Efisiensi

Tingkat probabilitas sebesar 0,0009, lebih kecil dari α 0,05. Hal ini berarti secara parsial BOPO berpengaruh signifikan terhadap ORD. Hal ini dikarenakan jika semakin rendah nilai BOPO maka semakin efisien bank dalam mengelola biaya operasionalnya sehingga akan mengurangi kemungkinan terjadi masalah dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya karena semakin efisien maka pendapatan operasional juga dapat semakin meningkat dan mampu menutup beban operasional dengan baik. Begitupun sebaliknya jika BOPO tinggi maka bank tidak bisa efisien dalam mengelola bebannya. Hal ini dipengaruhi bahwa adanya kewajiban untuk menjaga reputasi kinerja BUS. Dengan demikian, ketika BUS semakin tidak efisien dalam mengelola biaya operasionalnya maka akan cenderung mengurangi pengungkapan risiko operasional untuk melindungi reputasi kinerja BUS. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya risiko operasional juga dapat semakin meningkat.

Dalam teori *stakeholders*, perusahaan harus mampu mengelola biaya operasional agar dapat menoperasikan perusahaan dengan baik sehingga memberikan manfaat bagi seluruh *stakeholders*. Meskipun apabila rasio BOPO tinggi maka perusahaan tidak efisien, perusahaan tetap dituntut untuk transparan kepada *stakeholders*. Hal ini didukung juga oleh teori keagenan, dimana apabila perusahaan tetap melakukan pengungkapan maka akan mengurangi biaya keagenan sehingga *stakeholders* akan tetap percaya terhadap kinerja manajemen. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nova and Oktaviana (2016) yang menyatakan bahwa BOPO berpengaruh signifikan terhadap ORD.

Jumlah Anggota DPS

Tingkat probabilitas sebesar 0,8914 yang lebih besar dari α (0,05). Dapat disimpulkan DPS tidak berpengaruh signifikan terhadap ORD secara parsial. Pengaruh ini disebabkan oleh jumlah anggota DPS yang cenderung sama pada setiap perbankan syariah. Sedangkan perusahaan tetap memiliki kewajiban untuk melakukan pengungkapan sehingga berapa banyak jumlah anggota DPS, BUS akan tetap melakukan pengungkapan atas risiko operasional untuk menjaga kredibilitas dan legitimasi praktik manajemen risiko operasional BUS. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Saufanny and Khomsatun (2019) serta Khoirudin (2013) yang menyatakan bahwa jumlah DPS tidak berpengaruh signifikan terhadap ORD.

Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan tabel diketahui bahwa variabel FDPS memiliki tingkat probabilitas sebesar 0,0450 yang lebih kecil dari α (0,05). Hal ini berarti secara parsial FDPS berpengaruh signifikan terhadap ORD. Hal ini dapat menandakan bahwa semakin sering DPS mengadakan pertemuan untuk membahas kegiatan operasional bank syariah maka semakin banyak informasi yang dapat diungkapkan oleh perusahaan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah di perbankan syariah di Indonesia adalah meliputi opini untuk persetujuan produk, mengawasi kegiatan operasional bank syariah agar berjalan sesuai akad syariah serta memberikan pernyataan bahwa bank telah menjalankan kegiatan operasional sesuai prinsip syariah sehingga dalam setiap pertemuan rutin yang dilakukan terdapat agenda evaluasi berkelanjutan atas pelaksanaan operasional bank. Dalam hal ini, kebijakan pengungkapan risiko adalah sebagai bagian dari tanggungjawab pengawasan operasional yang telah dilakukan manajer kepada *stakeholders* sehingga *stakeholders* mengetahui bahwa fungsi pengawasan dewan telah berjalan dengan baik. *Stakeholders* memiliki harapan terhadap bank syariah yang beroperasi dalam koridor prinsip Islam sehingga memenuhi kepatuhan syariah adalah salah satu tujuan yang harus dipenuhi bank syariah sehingga akan menjaga kepercayaan *stakeholders* kepada bank. Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian dari Eleamer et al (2019) yang menyatakan bahwa frekuensi rapat DPS berpengaruh signifikan terhadap ORD.

V. SIMPULAN

Penelitian ini melengkapi literatur mengenai tata kelola perusahaan Islam dengan memasukkan teori pemangku kepentingan, teori keagenan, teori sinyal, dan teori legitimasi untuk memberikan bukti yang lebih kuat tentang dampak dari sistem tata kelola perusahaan Islam beserta efisiensi, profitabilitas, dan ukuran perusahaan pada pengungkapan risiko operasional di Indonesia. Temuan dari penelitian ini akan memberikan bukti bahwa sistem tata kelola Islam, efisiensi, profitabilitas,

dan ukuran perusahaan dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan risiko operasional pada perbankan syariah.

Berdasarkan penjabaran dari penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Total aset, ROA, BOPO, jumlah anggota DPS, dan frekuensi rapat DPS secara simultan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Operational Risk Disclosure (ORD) pada BUS di Indonesia.
2. Total Aset, BOPO, dan frekuensi rapat DPS secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Operational Risk Disclosure (ORD) pada BUS di Indonesia.
3. ROA dan ukuran Dewan Pengawas Syariah secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap Operational Risk Disclosure (ORD) secara parsial pada BUS di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M., Shahimi, S., & Ghafar Ismail, A. (2011). Operational risk in Islamic banks: Examination of issues. *Qualitative Research in Financial Markets*, 3(2), 131–151. <https://doi.org/10.1108/17554171111155366>
- Adelopo, I. (2011). Voluntary disclosure practices amongst listed companies in Nigeria. *Advances in Accounting*, 27(2), 338–345. <https://doi.org/10.1016/j.adiac.2011.08.009>
- Ajija, S. R., Sari, D. W., Setianto, R. H., & Primanti, M. R. (2011). *Cara cerdas menguasai Eviews*. Jakarta: Salemba Empat.
- Aminah, S., Erina, N., Khairudin, & Damayanti, T. (2019). Financial performance and market share in Indonesia Islamic banking: Stakeholder theory perspective. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(1), 14–18.
- Aryani, D. N., & Hussainey, K. (2017). The determinants of risk disclosure in the Indonesian non-listed banks. *International Journal of Trade and Global Markets*, 10(1), 58–66. <https://doi.org/10.1504/IJTGM.2017.082376>
- Baidok, W., & Septiarini, D. F. (2016). Pengaruh dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, dewan pengawas syariah, frekuensi rapat dewan komisaris syariah, dan frekuensi rapat komite audit terhadap pengungkapan indeks Islamic Social Reporting pada bank umum syariah periode 2010-201. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 3(12), 1020. <https://doi.org/10.20473/vol3iss201612pp1020-1034>
- Barakat, A., & Hussainey, K. (2013). Bank governance, regulation, supervision, and risk reporting: Evidence from operational risk disclosures in European Banks. *International Review of Financial Analysis*, 30, 254–273. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2013.07.002>
- Connelly, B. L., Certo, S. T., Ireland, R. D., & Reutzel, C. R. (2011). Signaling theory: A review and assessment. *Journal of Management*, 37(1), 39–67. <https://doi.org/10.1177/0149206310388419>
- Doi, C. J., & Harto, P. (2017). Analisis pengaruh karakteristik perusahaan terhadap tingkat pengungkapan risiko pada perusahaan manufaktur. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 538–549.
- Elamer, A. A., Ntim, C. G., Abdou, H. A., & Pyke, C. (2020). Sharia supervisory boards, governance structures and operational risk disclosures: Evidence from Islamic banks in MENA countries. *Global Finance Journal*, 46. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2019.100488>
- Elms, H., & Berman, S. (1997). Stakeholder-agency theory. *Proceedings of the International Association for Business and Society*, 8(March), 657–668. <https://doi.org/10.5840/iabsproc1997863>
- Ginena, K. (2014). Shari'ah risk and corporate governance of Islamic banks. *Corporate Governance (Bingley)*, 14(1), 86–103. <https://doi.org/10.1108/CG-03-2013-0038>
- Greuning, H. V., & Iqbal, Z. (2011). *Analisis risiko perbankan syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Guthrie, J., & Parker, L. D. (1989). Corporate social reporting: A rebuttal of legitimacy theory. *Accounting and Business Research*, 19(76), 343–352. <https://doi.org/10.1080/00014788.1989.9728863>
- Hadi, N. H., & Fatihin, M. K. (2020). Determinants of sharia banking market share growth in Indonesia. *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(2), 87.

- <https://doi.org/10.20473/aijief.v1i2.20805>
- Harjoto, M., & Laksmana, I. (2018). The impact of corporate social responsibility on risk taking and firm value. *Journal of Business Ethics*, 151(2), 353–373. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3202-y>
- Helbok, G., & Wagner, C. (2006). Determinants of operational risk reporting in the banking industry. *The Journal of Risk*, 9(1), 49–74. <https://doi.org/10.21314/jor.2006.140>
- Hemrit, W. (2020). Difference between the determinants of operational risk reporting in Islamic and conventional banks: Evidence from Saudi Arabia. *Journal of Operational Risk*, 15(1), 1–38. <https://doi.org/10.21314/JOP.2019.235>
- Ibrahimovic, S., & Franke, U. (2017). A Probabilistic approach to IT risk management in the Basel regulatory framework: A case study. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 25(2), 176–195. <https://doi.org/10.1108/JFRC-06-2016-0050>
- Izhar, H., & Asutay, M. (2010). A theoretical analysis of the operational risk framework in Islamic banks. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 18(1), 73–113.
- Jelita, W. R. S., & Shofawati, A. (2019). Manajemen risiko operasional pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Nur Tebuireng di Surabaya. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 69. <https://doi.org/10.22219/jes.v4i1.8733>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1979). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 163–231. <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0304405X7690026X>
- Khoirudin, A. (2013). Corporate governance dan pengungkapan Islamic social reporting pada perbankan syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 2(2), 227–232. <https://doi.org/10.15294/aaj.v2i2.2919>
- Neifar, S., & Jarboui, A. (2018). Corporate governance and operational risk voluntary disclosure: Evidence from Islamic banks. *Research in International Business and Finance*, 46(146), 43–54. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.09.006>
- Nova, R. S., & Oktaviana, U. K. (2016). Analisis pengungkapan sukarela bank syariah di Indonesia. *El-Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 6(1), 94–110. <https://doi.org/10.18860/em.v6i1.3894>
- Nugroho, M. R. (2012). *Pengaruh profitabilitas, efisiensi, dan total aset terhadap tingkat pengungkapan risiko operasional bank umum syariah di Indonesia*. Skripsi tidak diterbitkan. Depok: Universitas Indonesia.
- Pradnyani, I. G. A. A., & Sisidyani, E. A. (2015). Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan ukuran dewan komisaris pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi*, 11(2), 384–397.
- Saufanny, A. D., & Khomsatun, S. (2019). Corporate governance dan pengungkapan manajemen risiko bank syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 5(1), 47–61. <https://doi.org/10.35836/jakis.v5i1.13>
- Yuanisa, L. (2019). *Pengaruh kepemilikan institusional dan tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan risiko operasional perbankan syariah*. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.